MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
Jalan Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan), Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70732, www.pttun-banjarmasin.go.id, pttun.banjarmasin@gmail.com

Banjarbaru,8 Agustus 2024

Nomor : 730/ KPTTUN.W6-TUN/PR.01.04/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Di – Jln. Tjilik Riwut No.Km 5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan* Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimaksudkan untuk:
   a. *memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi* Pemerintah (SAKIP);
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memperoleh nilai sebesar 80,1 atau A (kategori).
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2022	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	
Nilai Akuntabilias Kinerja			71,65	
			Predikat	BB

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,90	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,45	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	
Nilai Akuntabilias Kinerja			80,10	
			Predikat	A

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1	Pedoman teknis perencanaan kinerja sudah ada tapi belum diformalkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan atau berupa SOP Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja
2	Terdapat satu target yang tidak tercapai yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding
3	Sudah memiliki Pohon Kinerja akan tetapi Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)
4	Diperlukan SOP dari masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan
B. Pengukuran Kinerja	
1	Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui rapat monev atas data yang ada di SIPP dan MIS
2	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja
C. Pelaporan Kinerja	
1	Perlu diberikan gambaran tujuan DIPA dengan tujuan untuk mencapai kinerja
2	Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya berdampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan secara berjenjang.
2	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimamfaatkan secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan akan tetapi belum dilengkapi dengan hasil tindaklanjut dari tiap-tiap bidang
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh SDM yang memadai akan tetapi perlu ditambah SDM untuk mengikuti pelatihan SAKIP
5	Terdapat Target Perjanjian Kinerja belum tercapai 100%

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1	Menyusun dan menetapkan SK Ketua tentang pedoman teknis perencanaan kinerja dan SOP Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja
2	Melakukan Reviu Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahunan secara berkala, *khususnya untuk target-target yang belum tercapai*
3	Memperbaiki Pohon Kinerja (bagi habis berjenjang) untuk mencapai tujuan organisasi (proses bisnis), yang menggambarkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan *(Crosscutting)*
4	Dalam menetapkan target kinerja agar memperhatikan capaian target pada tahun sebelumnya atau capaian nasional
5	Menyusun SOP dari masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan
B. Pengukuran Kinerja	
1	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yang berdasarkan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
2	Melakukan Rapat Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran untuk penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
3	Memamfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk menyusun strategi dan kebijakan di tahun berikutnya
C. Pelaporan Kinerja	
1	Agar memperjelas gambaran tujuan DIPA dengan tujuan untuk mencapai masin

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

	masing Indikator kinerja
2	Terhadap indicator kinerja yang tidak tercapai agar dilakukan evaluasi serta dilengkapi dengan tindaklanjutnya
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang dari tiap-tiap bagian
2	Memamfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja
3	Diperlukan tindaklanjut dari masing-masing bidang atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
4	*Mengusulkan pegawai lagi untuk mengikuti pelatihan penyusunan Dokumen* Akuntabilitas Kinerja
5	Memperhatikan dan melakukan analisis dalam menetapkan target kinerja

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat *ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tata* Usaha Negara Palangkaraya.

Terhadap hasil evaluasi atas kinerja tersebut Saudara/i diminta menyusun laporan hasil tindaklanjut evaluasi paling lambat pada bulan oktober 2024 dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin

Bambang Heriyanto
NIP. 196212121988031002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN